LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

"PEMETAAN RAWAN KASUS DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM BANDUNG"

DISUSUN OLEH

NAMA	**:**	**TEGAR SETYA DHARMA,S.H.**
NDH	**:**	**02**
INSTANSI	**:**	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

PELATIHAN DASAR GOLONGAN III ANGKATAN KE-1

PUSAT PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMETAAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

TAHUN 2019

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

"PEMETAAN RAWAN KASUS DI WILAYAH KERJA BALAI BESAR POM BANDUNG"

DISUSUN OLEH

NAMA	**:**	**TEGAR SETYA DHARMA**
NDH	**:**	**02**
INSTANSI	**:**	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

DISAMPAIKAN PADA SEMINAR PELAKSANAAN AKTUALISASI
HARI/TANGGAL : SELASA, 25 JUNI 2019

a.n Kepala Puslatbang PKASN,
Kabid Latbang

Coach

Drs. Eris Yustiono, M.Sc

H. Gugum Gumelar, S.H.

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN AKTUALISASI

NILAI-NILAI DASAR PROFESI ASN, KEDUDUKAN DAN PERAN ASN DALAM NKRI

Judul : Pemetaan Rawan Kasus di Balai Besar POM Bandung

Nama : Tegar Setya Dharma
NIP : 19930228 201903 1 003
Unit Kerja : Balai Besar POM Bandung

Disusun Oleh:

Tegar Setya Dharma, S.H.
NIP. 19930228 201903 1003

Telah diuji di depan Penguji Pada tanggal 25 Juni 2019

MENTOR	COACH
Dra. Siti Rulia, Apt.	H. Gugum Gumelar, S.H.,
NIP. 19620916 198803 2001	NIP. 19610917 199303 1001

PENGUJI

Ir. Euis Nurmalia, M.Si.
NIP.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Rancangan Kegiatan Aktualisasi yang berjudul "Pemetaan Rawan Kasus di Balai Besar POM Bandung".

Rancangan Laporan Aktualisasi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi sebagai Tugas Akhir dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Tahun 2019. Terselesaikannya Laporan Aktualisasi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dra. Siti Rulia, Apt. selaku mentor yang telah bersedia membimbing penulis dengan sabar,
2. H. Gugum Gumelar, S.H., selaku *coach*, yang telah membimbing penulis dalam penulisan Rancangan Laporan Aktualisasi,
3. Orangtua dan keluarga yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan dan semangat,
4. Seluruh teman-teman Peserta Latsar CPNS Golongan III Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), khususnya angkatan I,
5. Serta seluruh pihak yang terlibat dan turut membantu dalam penyelesaian Laporan Rancangan Aktualisasi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Rancangan Aktualisasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Jatinangor, 24 Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN..... i
KATA PENGANTAR..... ii
DAFTAR ISI.....iii
LAMPIRAN LEMBAR BIMBINGAN COACH…….iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tujuan..... 2
C. Ruang Lingkup 2
BAB II. TINAJUAN PUSTAKA..... …3
Deskripsi Organisasi 3
1. Visi, Misi, Tugas Pokok Organisasi..... 2
2. Nilai-nilai Dasar PNS……...2
BAB III. LAPORAN AKTUALISASI……... 20
A. Kenada dan Solusi……....20
B. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi……22
C. Hasil Aktualisasi……...22
1. Melapor kepada atasan rencana pemetaan daerah rawan kasus ...…..23
2. Mengumpulkan data …… 25
3. Pemetaan daerah rawan kasus…… .27
4. Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat……..29
5. Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus di wilayah kerja….31
BAB IV. PENUTUP…….……38
DAFTAR PUSTAKA ..... ….. 40
LAMPIRAN ……

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN memiliki fungsi sebagai Penyelenggara Kebijakan Publik, Pelayan Publik dan Perekat dan Pemersatu Bangsa. Salah satu sektor penting yang menjadi tanggung jawab ASN adalah di bidang pengawasan obat dan makanan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. BPOM mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindak Pidana di bidang obat dan makanan di Indonesia menjadi salah satu fokus Badan POM, dimana didalam misi nomor 1 Badan POM disebutkan bahwa Badan POM akan "Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat". Hal ini dilatarbelakangi semakin maraknya kasus pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan.

Balai besar POM di Bandung adalah salah satu Balai pengaawasan obat terbesar di bawah Badan POM RI. Balai POM di Bandung dikatakan besar dikarenakan cakupan wilayah yang besar yaitu melingkupi Jawa Barat dengan luas kurang lebih 35.380 km2 jumlah penduduk Jawa Barat kurang lebih 48 juta jiwa.selain Balai terdapat juga BALAI BESARPOM yang berbagi tugas dengan Balai POM di Bandung yakni Balai BesarBogor dan Balai BesarBandung. Besar wilayah dan banyaknya penduduk mempengaruhi banyaknya industri yang mebuka lahan di Jawa Barat terutama industri terkait pangan dan obat-obatan, banyakya industri kemudian berpengaruh terhadap berbagai kecurangan dan kejahatan terkait pangan dan obat. BPOM Bandung mempunyai target yang besar terkait

penindakan kejahatan obat dan makanan yakni dalam setahun pencapaian target sebanyak 23 kasus dan merupakan Balai dengan kasus kejahatan pangan terbanyak di Indonesia. Penjelasan diatas merupakan alasan penulis mengangkat tema ini sebagai tugas aktualisasi Latsar CPNS BPOM tahun 2019

B. Tujuan

CPNS diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan tugas pokoknya pada kegiatan aktualisasi di lingkungan kerja.Aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dalam bentuk nilai-nilai ANEKA ini memiliki tujuan :

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dasar yang terkait ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi).
2. Menanamkan dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ANEKA di tempat kerja sesuai kegiatan.
3. Menganalisis dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang pelaksanaannya tidak didasarkan pada nilai ANEKA.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari aktualisasi ini yaitu pelaksanaan kegiatan aktualisasi mulai dari tanggal 30 April 2019 sampai dengan 24 Juni 2019 di Balai Besar POM dai Bandung pada seksi penindakan. Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai Akuntabilitas, Nasonalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA), dan kegiatan yang bersumber pada SKP (Sasaran Kerja Pegawai) serta tugas dari atasan maupun inisiatif sendiri

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Visi dan Misi Organisasi

1. Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi dan Budaya Organisasi

Visi BPOM

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Misi BPOM

1. Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM;

Tugas Pokok BPOM

Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

B. Nilai-nilai Dasar ASN

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah untuk sesuatu yang merujuk kepada kewajiban individu, kelompok atau organisasi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya yaitu

a. menjalankan nilai-nilai publik. Artinya seorang PNS yang akuntabel dituntut untuk :

b. Mampu mengambil pilhan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan.

c. Memilki kemampuan dan kesadarn untuk menghindari dan mencega keterlibatan PNS dalam politik praktis
d. Menciptakan kesamaan persepsi atas setiap informasi atau instruksi yang diperoleh
e. Memperlakukan masyarakat dengan baik dalam pelayanan publik
f. Konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan.

2. Nasionalisme

Nasionalisme adalah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan agar bangsa Indonesia senantiasa menempatkan persatuan kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa serta negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Rasa kebangsaan adalah kesadaran berbangsa, yakni rasa yang lahir secara alamiah karena adanya kebersamaan sosial yang tumbuh dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan masa lampau, serta kebersamaan dalam menghadapi tantangan sejarah masa kini.

Nilai-nilai nasionalisme harus dimiliki oleh setiap PNS dalam menjalankan fungsi, tugas jabatannya.

3. Etika Publik

Etika Publik, dinyatakan bahwa Weihrich dan Koontz (2005:46) mendefinisikan etika sebagai *"the dicipline dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation"*. Secara lebih spesifik Collins Cobuild (1990:480) mendefinisikan etika sebagai *"an idea or moral belief that influences the behaviour, attitudes and philosophy of life of a group of people"*.

Moral adalah tata cara, kebiasaan, adat. Sedangkan etika adalah seperangkat nilai yang dijadikan acuan. Kode etik adah aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus dalam ketentuan yang tertulis. Etika kerja adalah nilai yang menjadi acuan dalam aktivitas kerja. Perilaku bermoral perilaku yang sesuai harapan kelompok masyarakat. Perilaku etis perilaku yang sesuai dengan sistem nilai yang ditetapkan.

Terdapat 4 aliran pemikiran etika yaitu teori empiris yang didasarkan kepada pengalaman, teori rasional yang didasarkan kepada logika, teori intiuitif berdasarkam intuisi yang meramalkan kemungkinan yang terjadi tetapi ada kemungkinan tidak dapat dipertanggungjawabkan tidak dapat di jelaskan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya teori wahyu yang berdasarkan pada ajaran agama atau kitab suci.

4. Komitmen Mutu

Komitmen mutu diperlukan dalam rangka mewujudkan standar pelayanan prima seorang ASN kepada publik atau stakeholdernya. Tujuan dari adanya komitmen mutu adalah adalah target / kinerja yang memuaskan. Pemimpin bertugas untuk membuat rencana mutu, melakukan pengawasan mutu dan perbaikan mutu serta mensosialisasikan standar mutu. Jika komitmen mutu sudah ditegakkan dengan baik, maka tugas selanjutnya adalah melakukan perbaikan mutu. Berikut nilai-nilai dasar orientasi mutu yang harus dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada publik sebagai pelaksana kebijakan pemerintah :

1. Layanan publik adalah komitmen bagi kepuasan masyarakat.
2. Perlindungan kepada publik terkait pergeseran kebutuhan,
3. Membangun mindset dan komitmen pegawai terhadap budaya mutu;
4. Meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan;
5. Beradaptasi dengan perubahan;
6. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal;
7. Membangun kerjasama kolegial antarpegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran;
8. Menampilkan kinerja tanpa cacat (*zero-defect*) dan tanpa pemborosan (*zero- waste*), sejak memulai setiap pekerjaan.

5. Anti Korupsi

Dasar hukum perilaku anti korupsi bagi warga negara Indonesia adalah UU No.81 tahun 1981 dan UU No.31 tahun 1999 junto UU No.20 tahun 2001. Tujuan dari pelatihan dasar tentang anti korupsi bagi CPNS adalah membentuk perilaku CPNS yang jujur dan amanah dalam menjalankan fungsi jabatannya. Kata korupsi berasal dari

bahasa latin, *"corruptio"* yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap tidak bermoral penyimpangan dari kesucian, kata-kata yang menghina atau memfitnah. Menurut *Encyclopedia American*, korupsi adalah melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan/ perekonomian negara. Selain korupsi, ada perilaku buruk lain yang menajmur seperti korupsi yaitu kolusi. Kolusi adalah bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula (melanggar hukum) untuk mendapatkan keuntungan material bagi mereka. Sedangkan nepotisme adalah perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat atau kecenderungan untuk mengutamakan(menguntungkan) sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah.

BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI

1. Identifikasi Isu

Prioritas isu yang akan diangkat, dapat dikaitkan dengan identifikasi isu dengan alat APKL. **Aktual** artinya benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. **Problematik** artinya isu tersebut memiliki dimensi permasalahan yang kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya segera. **Kekhalayakan** artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan. **Layak** artinya isu tersebut masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan pemecahan masalahnya. di bidang Penindakan, yang menjadi isu diantaranya :

a. Sulitnya investigasi awal terkait jual beli online
b. Kurang optimalnya pengawasan kasus kejahatan makanan melalui pemetaan di BPOM Bandung
c. Kurangnya pengelolaan barang bukti dan alat bukti hasil penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan
d. Kurangnya kordinasi antar instansi dan lintas sektor terkait kegiatan penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan
e.

No	Isu	Kriteria Isu			
		A	P	K	L
1	Sulitnya melakukan investigasi awal terkait jual beli online	√	√	√	√
2	Kurang optimalnya pengawasan kasus kejahatan makanan melalui	√	√	√	√

	pemetaan di BPOM Bandung				
3	Kurangnya pengelolaan barang bukti dan alat bukti hasil penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan	√	√	√	√
4	Kurangnya kordinasi antar instansi dan lintas sektor terkait kegiatan penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan	X	√	√	√

Tabel 1.1 Pemilihan Isu Melalui Kriteria APKL

Adapun kaitannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Keterangan:

A : Aktual

P : Problematik

K : Kekhalayakan

L : Layak

Berdasarkan alat bantu penetapan isu yang telah digunakan, dapat disimpulkan bahwa isu no 1, 2, 3 memenuhi kriteria APKL.

Isu nomor 1, yaitu "Sulitnya melakukan penindak hasil investigasi awal terkait jual beli online "memenuhi semua kriteria APKL. Isu ini aktual karena di Balai Besar POM Bandung investigasi awal sulit untuk ditindak seolah-olah hanya buang-buang waktu,. Isu ini juga termasuk isu problematik karena belum adanya kepastian hokum, BPOM belum bisa melakukan penindakan secara konkret. Untuk kriteria kekhalayakan, isu ini juga memenuhi karena berdampak pada khayalak terkait penindakan di bidang obat dan makanan. Dimana obat dan makanan merupakan hajat hidup orang banyak yang harus diawasi peredarannya dan diminimalisir pelanggarannya. Selain itu, isu tersebut juga memenuhi kriteria kelayakan karena isu tersebut memungkinkan untuk ditangani.

Isu nomor 2, Kurang optimalnya pengawasan kasus kejahatan makanan melalui pemetaan di BPOM Bandung, peta rawan kasus belum optimal digunakan di wilayah kerja Balai Besar POM Bandung, yaitu di Jawa Barat. Isu ini juga memenuhi kriteria Problematik. Peta rawan kasus ini kebutuhannya penting mengingat dengan adanya peta ini maka pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM Bandung dapat lebih maksimal. Untuk kekhalayakan, isu ini juga memenuhi karena berkaitan dengan adanya peta ini masyarakat akan lebih terlindungi dari pelanggaran di bidang obat dan makanan. Isu ini juga memenuhi kriteria layak karena mungkin untuk direalisasikan.

Isu nomor 3, yaitu Kurangnya pengelolaan barang bukti dan alat bukti hasil penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan. Isu ini termasuk aktual karena Balai Besar POM Bandung yang masih terbatas untuk tempat penyimpanan sehingga kurang pengelolaan barang bukti dan alat bukti. Isu ini juga memenuhi kriteria problematik, dimana pengelolaan barang bukti dan alat bukti hasil penindakan dan penyidikan obat dan makanan karena terkait dengan efektivitas dan efisiensi proses penindakan. Isu ini memenuhi kriteria kekhalayakan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pihak yang dilindungi dari tindak pidana di bidang obat dan makanan. Isu ini termasuk kriteria layak karena mungkin untuk dilaksanakan.

2. Prioritas Isu

Setelah dianalisis menggunakan metode APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Kelayakan), diperoleh tiga buah isu yang memenuhi seluruh kriteria dan selanjutnya akan dijadikan prioritas isu. Isu-isu tersebut yaitu :

a. Sulitnya investigasi awal terkait jual beli online
b. Kurang optimalnya pengawasan kasus kejahatan pangan melalui pemetaan di BPOM Bandung
c. Kurangnya pengelolaan barang bukti dan alat bukti hasil penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan

Isu-isu yang memenuhi kriteria APKL tersebut kemudian dianalisis kembali menggunakan metode USG (*Urgency, Seriuousness*, dan *Growth*), yaitu :

- ***Urgensi (Urgensi)***

  Seberapa mendesak dikaitkan dengan waktu yang tersedia.

- ***Seriousness (Keseriusan)***

  Apabila masalah tidak ditangani maka akan timbul masalah lain yang lebih serius.

- ***Growt (Perkembangan Isu)***

  Apabila masalah dibiarkan maka masalah akan memburuk bila dibiarkan Hasil analisis isu menggunakan metode USG adalah sebagai berikut

No	Isu	U	S	G	Total	Prioritas
1	Sulitnya melakukan investigasi awal terkait jual beli online	4	3	4	11	III
2	Kurang optimalnya pengawasan kasus kejahatan makanan melalui pemetaan di BPOM Bandung	5	5	4	14	I
3	Kurangnya pengelolaan barang bukti dan alat bukti hasil penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan	4	4	4	12	II

Tabel 1.2 Pemilihan Isu Melalui Kriteria USG

Keterangan :

Skala Likert 1-5 (5 = sangat besar, 4 = besar, 3 = sedang, 2 = kecil, 1 = sangat kecil)

a. Urgensi (Urgensi)

b. Seriousness (Keseriusan)

c. Growt (Perkembangan Isu)

Setelah melakukan analisis dengan menggunakan metode USG pada ketiga isu diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa isu nomor 2 (dua) mendapat jumlah terbesar.

Permasalahan tersebut menjadi prioritas utama karena dengan adanya peta rawan kasus di Balai Besar POM Bandung,maka pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM Bandung akan semakin maksimal.

Berdasarkan analisi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa "pembuatan peta rawan kasus di wilayah Balai Besar POM Bandung " berkaitan dengan peran dan kedudukan ASN yaitu pelayanan publik.

3. Pemecahan Isu

Setelah prioritas isu yang akan dipecahkan terpilih, langkah selanjutnya adalah menganalisis gagasan pemecahan isu dengan mempertimbangkan faktor penyebab terjadinya terlebih dahulu. Isu belum adanya peta rawan kasus di Balai Besar POM Bandung, dapat disebabkan oleh beberapa faktor dibawah ini :

1. Peta Rawan tidak digunakan secara optimal di Kantor Balai Besar POM Bandung
2. Susahnya mencari atau mendata industri yang telah dibina dan ditindak
3. Kurangnya koordinasi antar unit kerja terkait penindakan kejahatan obat dan makanan

Setelah memahami faktor-faktor yang menyebabkan isu, berikut beberapa alternatif gagasan yang dapat digunakan untuk menyelesaikan isu tersebut :

Pembuatan peta rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM Bandung. Gagasan "Pembuatan peta rawan kasus di Balai Besar POM Bandung" menjadi gagasan yang aktual dan akan menjadi gagasan dalam pemecahan isu "belum adanya peta rawan kasus di Balai Besar POM Bandung". Dengan dibuatnya peta rawan kasus di Balai Besar POM Bandung di bidang pengawasan obat dan makanan akan maksimal.

MATRIX KEGIATAN

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output Hasil	Nilai ANEKA	Kontribusi Visi dan Misi	Penguatan Nilai Organisasi
1	Melaporkan kepada atasan rencana pembuatan peta rawan kasus	Meminta kesediaaan waktu mentor untuk diskusi (menghadap atasan secara langsung)	Catatan masukan dan saran dari atasan	a. Akuntabilitas : patuh dan taat pada perintah atasan. (menerima instruksi terkait laporan renaca pemetaan)	Sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	Kegiatan ini sesuai dengan nilai organisasi BPOM yaitu profesional dan kerjasama (profeisonal dalam pelaksanaan tuga atau pekerjaan dan kerjasama dalam perumusan masalah)
		meminta saran dan masukan dari mentor (menghadap secara langsung)		b. Nasionalisme : Musyawarah dan kerjasama. (mendiskusikan rencana pemetaan dengan atasan)		
		mencatat saran dan masukan dari mentor		c.. Etika Publik : Sopan santun (		

		(penulisan notulen)		etika ketika menghadap pada atasan dan menerima arahan)		
2	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan peta rawan kasus	menghubungi bidang pemeriksaan untuk meminta data (mengghubungi bidang terkait melalui surat/ menghadap lagsung untuk mendapatkan ijin)	Tersedianya data pembuatan peta rawan kasus	a. Akuntabilitas : Tanggung jawab (bertanggung jawab dengan pekerjaan yang dikerjakan dan jelas pertanggungan jawab terkait ijin)	Sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM (komunikasi yang terjalin antar unit kerja)	kegiatan ini sesuai dengan nilai organisasi BPOM yaitu profesional dan kredibel
		meminta data bagian bidang penindaka (setelah mendapatkan ijin maka dilakukan pengambilan data)		b. Komitmen Mutu : data validasi yang bisa di aplikasikan (mengambil data valid dari bidang		
		mengolah data yang telah dikumpulkan				

				terkait)		
3	Pembuatan peta rawan kasus	Menyiapkan alat dan bahan	Tersedianya peta kasus	a. Akuntabilitas : Integritas (bekerja sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas)	Sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;	Kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yaitu Profesional dan Kerjasama
				b. nasionalisme : rela berkorban (mengerjakan sesuatu yang berguna bagi organisasi dan negara)		
		pengaplikasian data yang telah disusun kedalam bentuk peta (penggambaran dari data yang diterima)		c. Etika Publik : taat aturan (bekerja secara tertib tanpa mengganggu tugas pokok yang lain)		

				d. komitmen mutu : berorientasi pada mutu (sungguh sungguh dalam pengerjaan agar mrndapat hasil yang maksimal)		
4	Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat	a.menyerahkan peta yang sudah dibuat kepada atasan (penyerahan dengan menghadap atasan dan menjelsakan peta rancangan)	Tersedianya peta yang sudah dibuat	a. Akuntabilitas : patuh (patuh terhadap aturan kerja, terhadap arahan atasan)	Sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	Kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yaitu Profesional dan Kerjasama
		b. mencatat saran, masukan dan koreksi dari atasan (catatan untuk masukan saran dari atasan)		b. nasionalisme : kerjasama (kerjasama untuk mendapatkan hasil kegiatan yang baik melalui diskusi)		

		c. memperbaiki peta sesuai saran, masukan dan koreksi atasan (tahapan revisi peta berdasar saran atasan)		c. etika publik : Sopan santun (etika ketika menghadap pada atasan dan menerima arahan)		
5	Sosialisari internal Peta rawan kasus kepad atas dan staff	a. menentukan waktu sosialisasi (konsultasi dengan atasan untuk menentukan waktu yang tepat)	daftar hadir sosialisasi	a. akuntabilitas : kejelasan (pemaparan peta hasil olah data)	Sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM	Kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yaitu Profesional dan Kerjasama
		b. mempersiapkan tempat (konfirmasi dengan pihak terkait untuk penggunaan tempat rapat)				
		c. melakukan sosialisasi (penyampaian hasil pemetaan kepada staff dan atasan)		b. nasionalisme : kejasama dan menggunakan bahasa yang baik dan benar (		

		d. meminta saran dan masukan dari stakeholder internal dan menindak lanjuti (melakukan pencatatan atas saran dan masukan dari staff dan atasan)		sosialisai dengan pihak terkait untuk tujuan organisasi)		
6	Membuat laporan tentang pembuatan peta rawan kasus dan laporan aktualisai	a. membuat format laporan (mencari contoh format laporan sebagai acuan pembuatan laporan)	adanya laporan akhir kegiatan pembuatan peta	a. akuntabilitas : tanggung jawab (penyerahan loporan dari pekerjaan yang diberikan)	sesuai dengan misi BPOM yaitu	Kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yaitu Profesional dan Kredibel
		b. membuat laporan				
		c. penyerahan berkas kepada atasan (menghadap atasan untuk menyerahkan hasil laporan)				

Table 1.3 Matrix Kegiatan Aktualisasi

PENJADWALAN

Maksud dari penjadwalan adalah waktu pelaksanaan aktualisais kegiatan-kegiatan guna memecahkan atau memberikan solusi terhadap issue yang diangkat atau dibahas.

No	Kegiatan	Mei				Juni		
		1	2	3	4	1	2	3
1	Melapor kepada atasan rencana pembuatan peta rawan kasus							
2	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan peta rawan kasus							
3	Pembuatan peta rawan kasus							
4	Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat							
5	Sosialisasi internal peta rawan Kasus							
6	Membuat laporan tentang pembuatan peta rawan kasus							

Table 1.4 rencana kegiatan aktualisasi

BAB IV
CAPAIAN AKTUALISASI

Rangkaian kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan seluruhnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2019 sampai dengan 23 Juni 2019 di Balai Besar POM di Bandung yang beralamat di Jalan Pasteur No 25, Pasir Kaliki, Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam pelaksanaanya, kegiatan dilakukan dengan menerapkan nilai-nilai ANEKA untuk Pemetaan Daerah Rawan Kasus di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung .

A. Kendala dan Solusi

Dalam Pelaksanaanya kegiatan aktualisasi, terdapat kendala yang penulis hadapi dalam menyelesaikan kegiatan yang telah direncanakan. Setiap kendala yang ada, diselesaikan dengan antisipasi-antisipasi yang telah disiapkan. Kendala dan antisipasi untuk setiap kegiatan ditunjukan pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Kendala dan Antisipasi kegiatan aktualisasi

No	Kegiatan	Kendala	Solusi
1	Melapor kepada atasan rencana pembuatan peta rawan kasus	Tidak ada kendala	
2	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan peta rawan kasus	Sulitnya mengumpulkan data-data awal untuk pembuatan peta rawan kasus	1. Menghubungi bidang pemeriksaan di BBPOM Bandung untuk meminta data dari tahun-tahun sebelumnya. 2. Menghubungi bidang Infokom untuk meminta data pengaduan dan informasi media 3. Meminta data di bagian

			Penindakan untuk data kasus yang ditangani
3	Pembuatan Peta Rawan Kasus	Penginputan data-data dalam sistem	Berkoordinasi dengan staf bidang penindakan di BBPOM Bandung pemetaan rawan kasus yang sesuai.
4	Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat	Sulitnya mencari waktu karena penuhnya agenda Kepala Bidang Penindakan dalam menghadiri kegiatan maupun undangan	Berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan melalui sambungan telepon
5	Sosialisari internal Peta rawan kasus kepad atas dan staff	Sulitnya menentukan jadwal sosialisasi dengan atasan, dan staff internal di Bidang Penindakan	Berkoordinasi terlebih dahulu dengan semua pegawai di Bidang Penindakan
6	Membuat laporan tentang pembuatan peta rawan kasus dan laporan aktualisai	Banyaknya pekerjaan diluar pembuatan dan masih berlangsug penginputan data rawan kasus	Koordinasi dengan Kepala Bidang untuk memberi laporan sementara dan meninta ketersediaan waktu

B. Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

Di dalam pelaksanaan kegiatan aktualisasi, beberapa kendala seperti disebutkan diatas membuat jadwal kegiatan bergeser dari yang dijadwalkan semula. Disamping itu kegiatan Balai Besar POM di Bandung yang cukup banyak di bulan Ramadhan dan mendekati Idul Fitri, juga mempengaruhi jadwal. Realisasi jadwal pelaksanaan aktualisasi ditunjukan pada tabel berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Jadwal Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Mei				Juni		
		1	2	3	4	1	2	3
1	Melapor kepada atasan rencana pembuatan peta rawan kasus							
2	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan peta rawan kasus							
3	Pembuatan Peta Rawan Kasus							
4	Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat							
5	Sosialisari internal Peta rawan kasus kepad atas dan staff							

C. Hasil Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi telah dilaksanakan dengan baik meskipun terdapat kendala-kendala yang penulis hadapi. Disamping itu, penerapan nilai-nilai ANEKA pada setiap kegiatan diharapkan dapat memperdalam pengetahuan mengenai ANEKA sebagai tahapan dari latihan dasar CPNS. Berikut adalah detil realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan.

1. **Melapor kepada atasan rencana pemetaan daerah rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung**

Kegiatan ini merupakan awal dari seluruh rangkaian kegiatan aktualisasi untuk menyelesaikan isu Belum Adanya Peta Rawan Kasus. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta petunjuk dan arahan atasan mengenai rencana pemetaan rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung. Adapun tahapan kegiatan ini yaitu :

a. Tahapan Kegiatan

1) Meminta kesediaaan waktu mentor untuk diskusi (menghadap atasan secara langsung) meminta saran dan masukan dari mentor
2) Meminta saran dan masukan dari mentor

Gambar 3.1, Meminta saran dan masukan dari mentor tanggal 3 Mei 2019
(lampiran 1)

b. Output Hasil

Notulensi masukan dan saran dari atasan

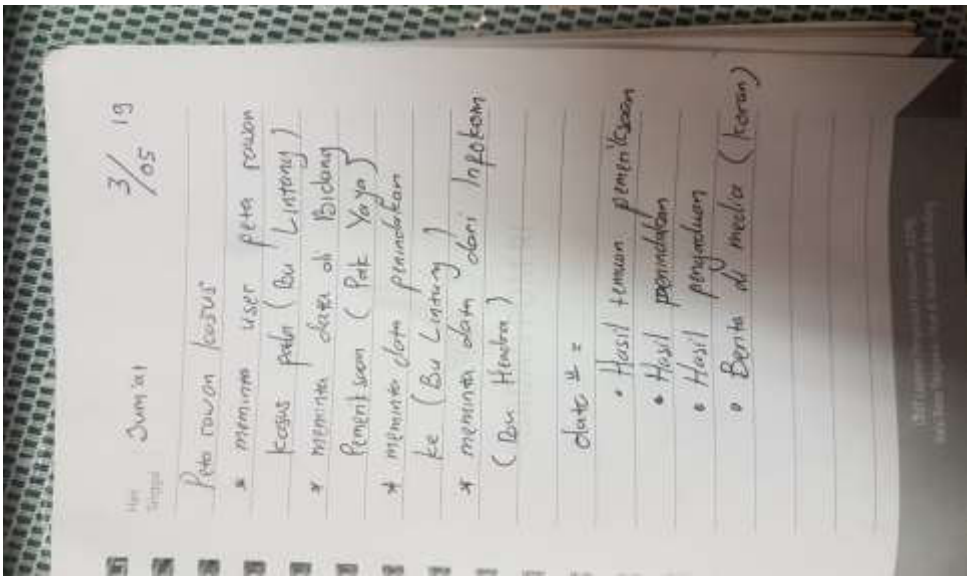
Hari Jumat 3/05 19
Tanggal
Peta rawan kasus
* meminta user peta rawan kasus pada (Bu Lintang)
* meminta data di Bidang Pemerintahan (Pak Yaya)
* meminta data pendukung ke (Bu Lintang)
* meminta data dari Inspektorat (Bu Hendra)
data :
• Hasil temuan pemerintahan
• Hasil pendukung
• Hasil penjaduan
• Berita di media (koran)

Gambar 3.2. Catatan dari mentor (lampiran 1)

c. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1) Akuntabilitas (patuh dan taat pada perintah atasan)

Ketika meminta kesedian waktu dari mentor, penulis telah patuh dan taat saat atasan menentukan waktu untuk berdiskusi.

2) Nasionalisme : musyawarah, kerjasama

Penulis telah bermusyawarah dan bekerjasama dengan mentor untuk mendapatkan saran dan masukan dari mentor

3) Etika Publik : sopan dan santun

Ketika berdiskusi dengan mentor, penulis telah mengedepankan sikap sopan dan Santun

d. Kontribusi Terhadap Visi Misi Organisasi

Kegiatan penulis sesuai misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. Dimana dengan adanya peta rawan kasus ini, diharapkan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih dapat ditekan. Sehingga kelembagaan BPOM semakin baik.

e. Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan nilai - nilai organisasi BPOM yaitu professional dan kerjasama. Dalam tahap kegiatan pertama ini, nilai profesional dibutuhkan dimana penulis telah melakukan diskusi dengan mentor atau atasan. Selain itu penulis juga telah menjalankan nilai kerjasama, dimana hal ini mutlak dibutuhkan untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan pemetaan daerah rawan kasus

Data awal yang diperlukan untuk pemetaan daerah rawan kasus di wilayah kerja, diperoleh dari bidang penindakan, bidang pemeriksiksaa, bidang informasi dan komunikasi di BBPOM Bandung. Kegiatan ini dilakukan sejak minggu pertama dengan melakukan koordinasi dengan staf terkait di BBPOM Bandung.

a. Tahapan Kegiatan

1) Menghubungi bidang pemeriksaan untuk meminta data (mengghubungi bidang pemeriksaan dengan menghadap lagsung kepada kepala Bidang)
2) Meminta data bagian bidang penindaka (setelah mendapatkan ijin maka dilakukan pengambilan data)
3) Mengolah data yang telah dikumpulkan

Gambar 3.3. Meminta data ke Bidang Pemeriksaan tanggal 6 Mei 2019
(lampiran 2)

b. Output Hasil

Tersedianya data awal pemetaan daerah rawan kasus

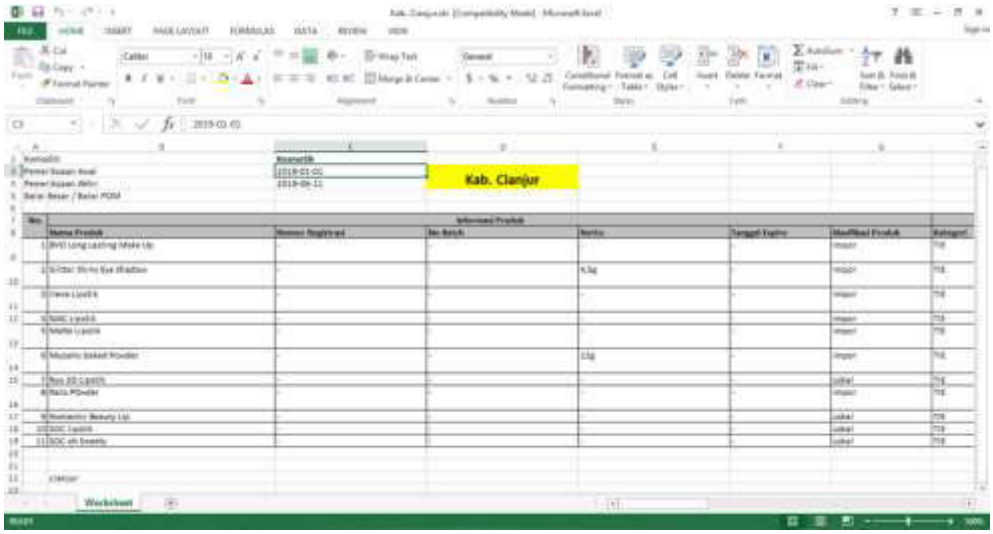

Gambar 3.4.Data dari Bidang Penindakan (lampiran 2)

c. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1) Akuntabilitas : Tanggung Jawab

Penulis telah mengedepankan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan ini. Hal ini bertujuan agar kegiatan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Komitmen mutu : data valid dan bisa diaplikasikan

Data yang akan penulis gunakan valid dan bisa diaplikasikan dalam bentuk peta. Hal ini sesuai dengan nilai komitmen mutu yang penting guna meningkatkan kualitas mutu.

d. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Kegiatan penulis sesuai misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. Dimana dengan adanya peta rawan kasus ini, diharapkan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih dapat ditekan. Sehingga kelembagaan BPOM semakin baik.

e. Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan nilai - nilai organisasi BPOM yaitu professional dan kredibel. Dimana dalam tahap kegiatan kedua ini, nilai profesionalisme dibutuhkan karena penulis akan mengumpulkan sumber data dari berbagai sumber. Kemudian nilai kredibel juga tidak kalah pentingnya, hal ini dikarenakan data yang didapatkan penulis dapat dipercaya kebenerannya.

3. Pemetaan daerah rawan kasus

Kegiatan pemetaan ini merupakan inti dari aktualisasi yang penulis susun. Pemetaan dilakukan sejak minggu ke 4 bulan April hingga minggu pertama bulan Mei. Data yang telah penulis kumpulkan di tahapan kegiatan sebelumnya, kemudian akan dituangkan ke dalam bentuk peta. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui daerah mana saja yang perlu mendapatkan pengawasan lebih dibandingkan dengan daerah yang lainnya. Kegiatan ini diharapkan dapat berlangsung berkelnjutan walaupun aktualisasi telah selesai dilakukan.

a. Tahapan Kegiatan

1) Menyiapkan alat dan bahan
2) Mengaplikasikan data yang telah didapatkan dalam bentuk peta

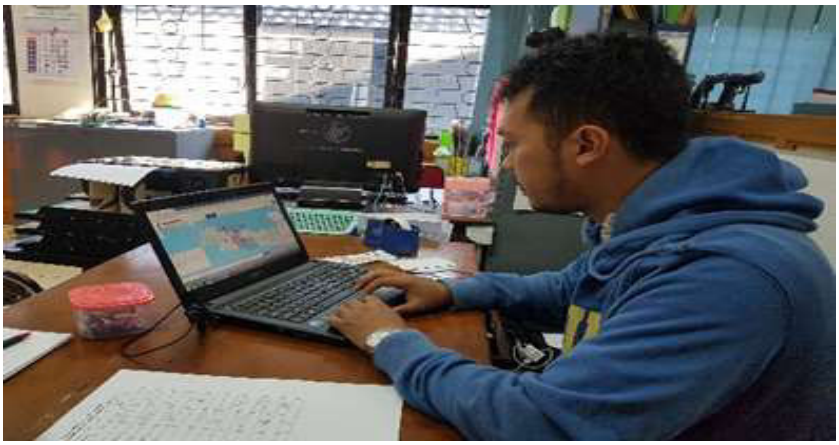

Gambar 3.5. Pembuatan Peta Rawan Kasus tanggal 20 Mei 2019
(lampiran 3)

b. Output Hasil

Tersedianya peta rawan kasus di wilayah BBPOM di Bandung

Gambar 3.6. Peta Rawan Kasus (lampiran 3)
Diakses melalui web. *http://penindakan.pom.go.id*

c. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1) Akuntabilitas : Integritas

Dalam kegiatan ke tiga ini, penulis telah menerapkan nilai integritas, dimana nilai integritas merupakan bentuk dari kesamaan antara kata dan perbuatan.

2) Nasionalisme : rela berkorban

Penulis telah menerapkan nilai rela berkorban,dimana Nilai rela berkorban dapat terlihat dari waktu dan tenaga yang dibutuhkan dalam pembuatan peta rawan kasus ini

3) Etika Publik : taat aturan

Dalam kegiatan ketiga ini, penulis telah menjalankan nilai taat aturan, dimana pembuatan peta rawan kasus harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku

4) Komitmen mutu: berorientasi pada mutu

Pembuatan peta rawan kasus didasari oleh nilai berorientasi pada mutu, sehingga diharapkan dapat terwujud peta rawan kasus yang dapat meningkatkan mutu kelembagaan. Maka dari itu penulis akan menerapkan nilai ini.

d. Kontribusi terhadap Visi Misi Organisasi

Kegiatan dalam tahap ini sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

e. Penguatan Nilai Organisasi

Kegiatan pembuatan peta rawan kasus ini meningkatkan koordinasi tim sehingga sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yaitu Profesional dan Kerjasama.

4. Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat

Koreksi dari atasan merupakan tahapan penting dalam pemetaan daerah rawan kasus ini. Koreksi dilakukan terkait kekurang-kekurangan pada peta yang telah dibuat.

a. Tahapan Kegiatan

1) Menyerahkan peta yang sudah dibuat kepada atasan
2) Mencatat saran, masukan dan koreksi dari atasan
3) Memperbaiki peta sesuai saran, masukan dan koreksi atasan

Gambar 3.7. Koreksi Peta Rawan Kasus tanggal 14 Juni 2019
(lampiran 4)

b. Output Hasil

Tersedianya peta yang sudah dikoreksi atasan

Gambar 3.8. Peta Rawan Kasus (lampiran 4)
Diakses melalui web. *http://penindakan.pom.go.id*

c. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1) Akuntabilitas : patuh

Penulis dalam menjalankan kegiatan ini telah patuh terhadap saran, masukan dan koreksi atasan.

2) Nasionalisme : kerjasama

Penulis telah melakukan nilai kerjasama. Dimana dibutuhkan nilai kerjasama sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik

3) Etika publik : sopan santun

Penulis Telah menerapkan nilai sopan santun dalam melaksanakan kegiatan ini.

d. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

Kegiatan dalam tahap ini sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. Hal ini didasarkan dengan adanya diskusi penulis dengan atasan yang akan meningkatkan koordinasi didalam tim.

e. Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yaitu Profesional dan Kerjasama. Dimana dibutuhkan nilai profesionalisme didalam melakukan diskusi dengan atasan dan juga kerjasama yang baik akan diharapkan akan menghasilkan tujuan yang diinginkan.

5 Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus di wilayah kerja

Tahapan sosialisasi ini dilakukan untuk menyampaikan pemetaan yang telah dibuat. Sosialisasi pemetaan ini dilakukan penulis hanya untuk kalangan internal staff kantor Balai Besar POM di Bandung. Hal ini dilakukan terkait rahasianya informasi daerah rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada minggu terakhir bulan Juni tahun 2019.

a. Tahapan Kegiatan

1) Menentukan waktu untuk melakukan sosialisasi
2) Mempersiapkan tempat untuk sosialisasi
3) Melakukan sosialisasi
4) Meminta saran dan masukan dari stakeholder internal

Gambar 3.9. Sosialisani Peta Rawan Kasus tanggal 17 Juni 2019
(lampiran 5)

b. Output Hasil

Daftar hadir sosialisasi

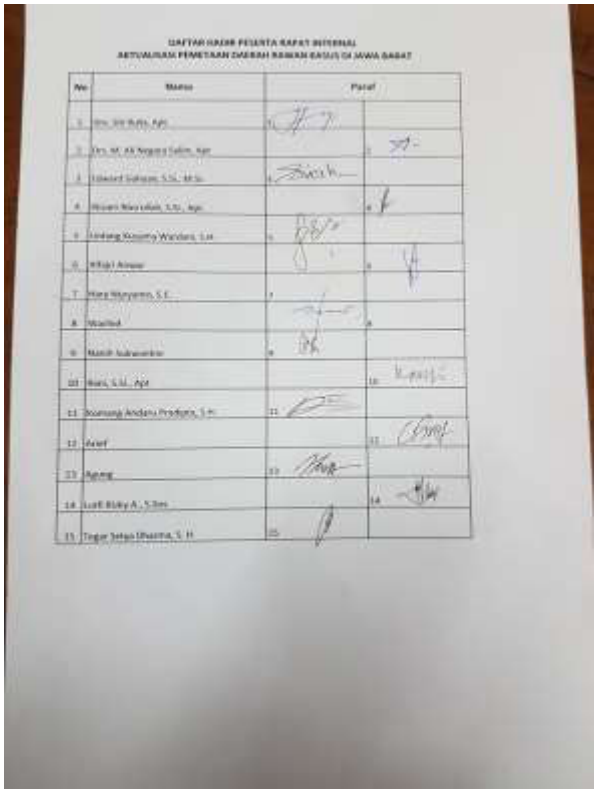

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT INTERNAL
AKTUALISASI PEMETAAN DAERAH RAWAN KASUS DI JAWA BARAT

No	Nama	Paraf			
1	[illegible]	1			
2	[illegible]			2	
3	[illegible]	3			
4	[illegible]			4	
5	[illegible]	5			
6	[illegible]			6	
7	[illegible]	7			
8	[illegible]			8	
9	[illegible]	9			
10	[illegible]			10	
11	[illegible]	11			
12	[illegible]			12	
13	[illegible]	13			
14	[illegible]			14	
15	[illegible]	15			

Gambar 3.9. Daftar Absensi Sosialisani Peta Rawan Kasus (lampiran 5)

c. Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan

1) Akuntabilitas : kejelasan

Penulis dalam menjalankan kegiatan ini telah mengedepankan kejelasan terkait dengan tempat dan waktu sosialisasi

2) Nasionalisme : kerjasama, menggunakan Bahasa yang baik dan benar

Dalam melakukan sosialisasi, penulis telah menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam pemyampaian sosialisasi dan tentunya kerjasama yang baik akan melancarkan kegiatan sosialisasi ini.

3) Etika publik : sopan santun

Penyampaian sosialisasi akan penulis lakukan dengan sopan santun, sehingga peserta sosialisasi akan merasa nyaman.

d. Kontribusi terhadap Visi Misi

Kegiatan ini Sesuai dengan Misi BPOM yaitu Sesuai dengan Misi BPOM yaitu Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM. Dimana proses sosialisasi internal yang baik akan semakin meningkatkan koordinasi didalam tim.

e. Penguatan nilai organisasi

Kegiatan ini sesuai dengan nilai-nilai organisasi BPOM yaitu Profesional dan Kerjasama. Dimana dibutuhkan nilai profesionalisme didalam melakukan sosialisasi dan juga kerjasama yang baik diharapkan akan menghasilkan tujuan yang diinginkan.

D. Analisis Dampak

Seorang Aparatur Sipil Negara atau ASN telah diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 untuk wajib menjalankan perannya yaitu mampu memberikan mampu memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, perekat dan pemersatu bangsa, serta sebagai pelaksana kebijakan publik. Peran ASN tersebut kemudian diturunkan kedalam nilai-nilai dasar ASN, yang kemudian menjadi landasan ASN dalam bekerja sehari-hari. Nilai-nilai dasar tersebut adalah ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi).

Pengamalan nilai-nilai dasar ANEKA tersebut diterapkan pada kegiatan aktualisasi penulis dengan tujuan untuk dapat membantu mencari solusi dari masalah yang terjadi pada instansi khususnya unit kerja. Apabila dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi ini tidak menerapkan nilai-nilai dasar ANEKA, maka akan terdapat dampak ataupun masalah yang dapat terjadi. Tabel berikut merupakan analisis dampak jika kegiatan tidak dilaksanakan menggunakan nilai-nilai dasar ASN.

Tabel 3.3 Analisis dampak jika nilai ANEKA tidak diterapkan

No	Kegiatan	Nilai Aneka	Analisis Dampak	
			Penerapan Nilai Aneka	Nilai Aneka Tidak diterapkan
1.	Melapor kepada atasan rencana pemetaan daerah rawan kasus	Akuntabilitas (patuh dan taat pada perintah atasan)	Pertemuan dengan atasan akan berjalan lancar sesuai waktu yang ditentukan atasan	Kesulitan untuk melakukan pertemuan dengan atasan terkait sibuknya jadwal atasan
		Nasionalisme (kerjasama, musyawarah)	Mendapatkan masukan dari atasan terkait pemetaan yang akan dilaksanakan	Tidak adanya masukan dari atasan yang akhirnya akan menyulitkan pemetaan daerah rawan kasus
		Etika Publik (sopan & santun)	Dengan sikap sopan dan santun, penulis mendapatkan Kemudahan dalam mendapatkan masukan dari	Hasil musyawarah tidak maksimal

			atasan	
2.	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pemetaan daerah rawan kasus	Akuntabilitas (tanggung jawab)	Data untuk pemetaan diperoleh dengan baik dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan	Pemetaan daerah rawan kasus akan sulit dilakukan jika data awal tidak didapatkan dengan baik
		Nasionalisme (transparansi)	Data yang diperoleh diketahui oleh atasan dan staff internal	Dalam memperoleh data, tidak diketahui oleh atasan atau staff lain sehingga kerjasama tim tidak berjalan baik
		Komitmen Mutu (data valid dan bisa diaplikasikan)	Data awal pemetaan telah sesuai dengan yang seharusnya	Data yang tidak valid akan membuat pemetaan tidak tepat atau sesuai yang seharusnya
3.	Pembuatan peta rawan kasus	Akuntabilitas (Integritas)	Pemetaan dilakukan dengan tuntas hingga berjalan lancar	Pemetaan tidak dilakukan dengan tuntas karena sikap integritas atau kesamaan kata dan perbuatan tidak

				diterapkan
		Nasionalisme (rela berkorban)	Pemetaan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan	Pemetaan akan sulit selesai pada waktu yang ditentukan jika tidak menerapkan sikap rela berkorban (waktu dan tenaga)
		Etika Publik (taat aturan)	Pemetaan dilakukan sesuai dengan aturan atau saran dari atasan	Pemetaan akan jauh dari rencana yang diharapkan karena tidak sesuai dengan aturan ataupun saran atasan
		Komitmen Mutu (berorientasi pada mutu)	Pemetaan yang dihasilkan akan dapat meningkatkan kelembagan	Pemetaan yang tidak berorientasi pada mutu, tidak berdampak banyak pada peningkatan kelembagaan
4.	Meminta atasan untuk mengkoreksi pemetaan yang sudah dibuat	Akuntabilitas (patuh)	Pemetaan yang telah dibuat sebelumnya dikoreksi oleh atasan agar sesuai dengan yang diharapkan	Pemetaan yang dibuat sebelumnya akan tidak sesuai apabila tidak mematuhi saran koreksi dari atasan
		Nasionalisme (kerjasama)	Pemetaan dikoreksi melalui kerjasama	Proses koreksi peta tidak berjalan dengan lancar

			yang baik dengan atasan	tanpa adanya kerjasama yang baik dengan atasan
		Etika Publik (sopan santun)	Proses koreksi pemetaan oleh atasan berjalan kondusif	Tanpa adanya sikap sopan santun, proses koreksi pemetaan akan berjalan kurang lancar
5.	Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus dengan atasan dan staff	Akuntabilitas (kejelasan)	Sosialisasi dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang jelas sehingga dihadiri oleh atasan dan staff terkait	Pelaksanaan sosialsiasi akan tidak maksimal dengan tidak adanya kejelasan terkait tempat dan waktu
		Nasionalisme (Kerjasama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar)	Kegiatan sosialisasi berjalan lancar	Kegiatan sosialisasi akan berjalan kurang lancar tanpa adanya kerjasama dan penggunaan bahasa yang baik
		Etika Publik (Sopan Santun)	Kegiatan Sosialisasi berjalan kondusif	Tanpa adanya sopan dan santun, penyampaian sosialisasi akan berjalan tidak kondusif

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelatihan Dasar atau Latsar CPNS merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh CPNS sebelum mengemban tugas sebagai PNS. Kompetensi yang diharapkan dapat diterapkan di unit kerja setelah mengikuti latsar adalah mengaktualisasikan lima nilai dasar yaitu kemampuan mewujudkan akuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik dalam melaksanakan tugas jabatannya, berinovasi untuk peningkatan mutu pelayanan publik, dan kemampuan untuk tidak korupsi dan mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansinya.

Aktualisasi sebagai salah satu kegiatan dalam pelaksanaan Latihan Dasar CPNS, membantu calon pegawai negeri sipil dalam pembentukan karakter dasar ASN didalam lingkungan kerja. Penerapan nilai-nilai ANEKA sangat membantu didalam pelaksanaan aktualisasi pemetaan daerah rawan kasus di Balai Besar POM di Bandung

Pemetaan daerah rawan kasus yang dalam pengerjaannya berpedoman pada nilai-nilai ANEKA, bermanfaat untuk meningkatkan kinerja Balai Besar POM di Bandung dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Dengan adanya pemetaan ini, maka pegawai akan lebih mudah menentukan daerah mana yang akan lebih mendapat perhatian untuk dilakukan pengawasan terkait pelanggaran di bidang obat dan makanan. Didalam pelaksanaan pemetaan ini, nilai ANEKA yang paling dominan adalah Akuntabilitas. Dimana patuh terhadap atasan, bertanggungjawab dan integritas akan sangat membantu ASN didalam menyelesaikan tugas-tugas didalam lingkungan kerja.

B. Komitmen Diri

Saya berkomitmen bahwa di dalam menjalankan tugas sehari hari di Balai Besar POM di Bandung, saya akan selalu menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti Korupsi. Serta kedudukan dan peran ASN dalam NKRI yaitu Manajemen ASN, Whole of Government, dan pelayanan publik. Serta menjalankan tugas dan fungsi jabatan saya dengan profesional sesuai kompetensi yang saya miliki.

Demikian komitmen ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandung, 23 Juni 2019

Tegar Setya Dharma, S.H.
(199302282019031003)

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 31 Tahun 1999. Tentang. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Modul ANEKA, LAN Jatinangor, 2019

LAMPIRAN LEMBAR BIMBINGAN COACH

Nama : Tegar Setya Dharma

Unit Kerja : Balai Besar POM Bandung

Isu :
1. Sulitnya melakukan investigasiawal terkait jual beli online
2. Kurang optimalnya peta rawan kasus di Balai Besar POM Bandung
3. Kurangnya pengelolaan barangbukti dan alat bukti hasil penindakan dan penyidikan Obat dan Makanan

Gagasan : Kurang optimalnya peta rawan kasus di Balai Besar POM Bandung

Coach : H. Gugum Gumelar SH.

No.	Tanggal	Kegiatan	Catatan Coaching – Output	Media Coaching	Paraf
1.	19 April 2019	Usulan judul dan isu	Perbaikan pemilhan kosakata untuk judul dan isu	Whatapp	
2.	23 April 2019	Revisi 1 usulan aktualisasi	Perbaikan nilai-nilai ANEKA dan penjabarannya	Tatap Muka	
3.	13 April 2019	Revisi 2 usulan aktualisasi	Perbaikan nilai-nilai ANEKA dan penjabarannya	Tatap Muka	

LEMBAR BIMBINGAN MENTOR

Nama : Tegar Setya Dharma
Unit Kerja : Balai Besar POM di Bandung
Isu : Belum optimalnya pemetaan daerah rawan kasus di Balai Besar POM di Bandung
Gagasan : Pemetaan daerah rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung
Mentor : Dra. Siti Rulia, Apt

No.	Tanggal	Kegiatan	Catatan	Media	Paraf
1	21 April 2019	Bimbingan Judul Aktualisasi	Judul aktualisasi mengambil dari uraian tugas di SKP yang telah diberikan	WhatsApp	
2	22 April 2019	Bimbingan Judul Aktualisasi	Menentukan daerah cakupan peta	WhatsApp	
3	2 Mei 2019	Melapor pada atasan	Konsultasi kepada atasan terkait rencana pelaksanaan aktualisasi	Tatap Muka	
4	3 Mei 2019	Konsultasi dengan atasan	Menentukan dokumen sumber pemetaan	Tatap Muka	
5	13 Mei 2019	Mendapatkan dokumen sumber	Dokumen sumber didapatkan dari beberapa bidang	Tatap Muka	
6	21 Mei 2019	Melapor kepada atasan terkait data yang sudah di kumpulkan dan kemudian dituangkan dalam bentuk peta	Pemetaaan dibuat per kabupaten/ kota	Tatap Muka	
7	17 Juni 2019	Melaporkan pemetaan yang sudah dikerjakan	Persetujuan atasan pemetaan yang sudah dikerjakan	Tatap muka	

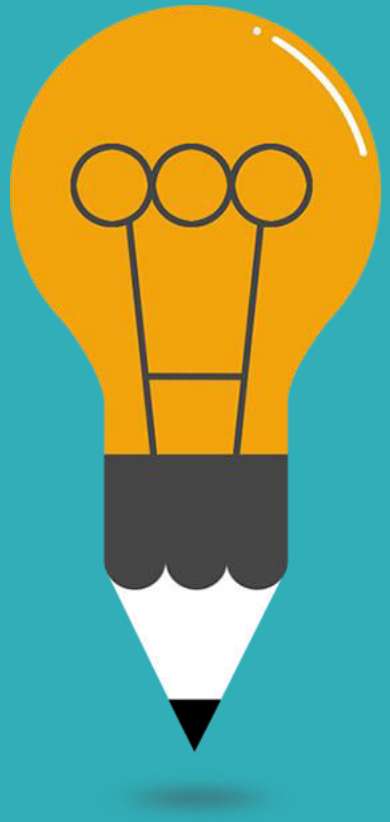

Laporan Aktualisasi
Nilai-Nilai Dasar ASN
di Balai Besar POM di Bandung

Pemetaan Daerah Rawan Kasus di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Bandung

Disusun Oleh :

Tegar Setya Dharma, S.H.

Latar Belakang

BADAN POM

Lembaga non kementerian yang Bertugas mengawasi perderan obat, obat tradisoinal, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Indonesia

Balai Besar POM di Bandung

bertugas mengawasi perederan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan di wilayah Jawa Barat

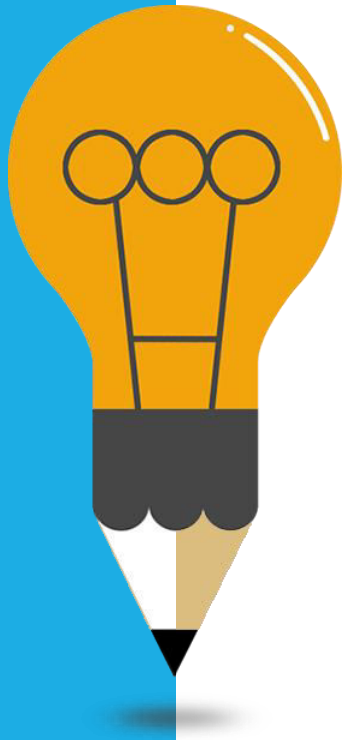

TUJUAN

01 Mengetahui daerah mana saja yang termasuk kategori rawan di wilayah Jawa Barat

02 Mempermudah melakukan pengawasan terkait peredaran obat & makanan di Balai Besar Pom di Bandung

03 Memperkuat tugas dan fungsi bidang penindakan di Balai Besar Pom di Bandung

RUANG LINGKUP

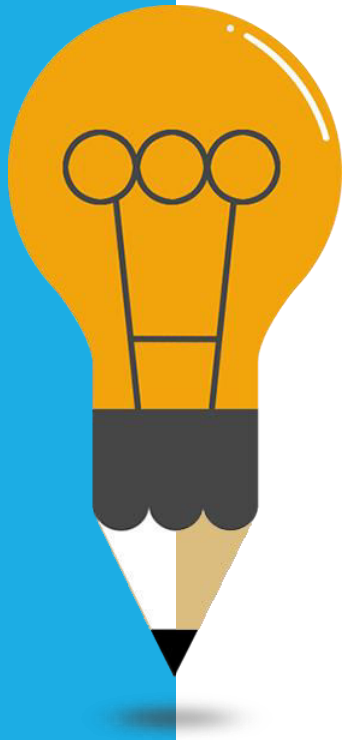

Balai Besar POM di Bandung

1 Mei 2019 – 23 Juni 2019

Rancangan Kegiatan

1. Melapor kepada atasan rencana Pemetaan daerah rawan kasus
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk peme taan daerah rawan kasus
3. Pemetaan daerah rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung
4. Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat
5. Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus kepada atasan dan staff
6. Membuat laporan tentang pemetaan daerah rawan kasus di wilayah kerja Balai Besar POM di Bandung

Realisasi Kegiatan

1. Melapor kepada atasan rencana Pemetaan daerah rawan kasus
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk peme taan daerah rawan kasus
3. Pemetaan daerah rawan kasus
4. Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat
5. Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus kepada atasan dan staff
6. Membuat laporan tentang pemetaan daerah rawan kasus

Jadwal Realisasi

No	Kegiatan	Mei				Juni		
		1	2	3	4	1	2	3
1	Melapor kepada atasan rencana pembuatan peta rawan kasus							
2	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pembuatan peta rawan kasus							
3	Pembuatan Peta Rawan Kasus							
4	Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat							
5	Sosialisari internal Peta rawan kasus kepad atas dan staff							

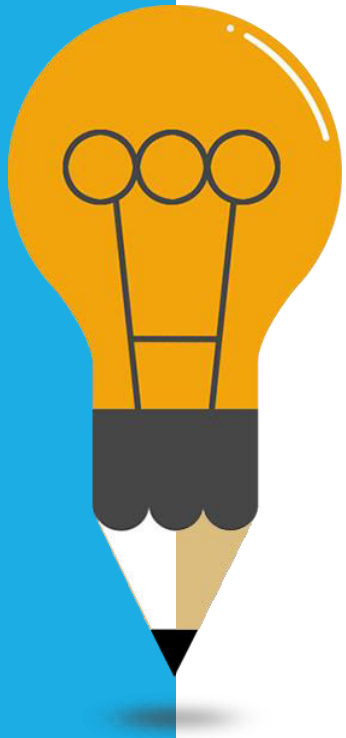

Kendala Dan Antisipasi

KEGIATAN	KENDALA	ANTISIPASI
1. Melapor kepada atasan rencana pemetaan daerah rawan kasus	1. Tidak ada kendala	1. Berjalan dengan baik
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pemetaan daerah rawan kasus	2. Sulitnya mengumpulkan data-data awal untuk pembuatan peta rawan kasus	2. Menghubungi bidang pemeriksaan, penindakan dan infokom di BBPOM Bandung untuk meminta data
3. Pemetaan daerah rawan kasus	3. Pengimputan data untuk dikelompokan	3. Berkoordinasi dengan staf bidang penindakan di BBPOM Bandung Terkait system pengimputan data
4. Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat	4. Jadwal atasan yang padat	4. Berkoordinasi terlebih dahulu dengan atasan melalui sambungan telepon maupun langsung untuk penyesuaian jadwal

KEGIATAN	KENDALA	ANTISIPASI
5. Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus	5.Sulitnya menentukan jadwal sosialisasi dengan atasan, dan staff	5.Berkoordinasi terlebih dahulu dengan semua pegawai di Bidang Penindakan untuk menetukan hari sosialisasi
Text Here		
6. Membuat laporan tentang pembuatan peta rawan kasus dan laporan aktualisai	6. Banyaknya pekerjaan diluar pembuatan dan masih berlangsug penginputan data rawan kasus, bisa dilakukan pelaporan di akhri tahun sebagai data Rawan Kasus di BBPOM Bandung tahun 2019	6. Koordinasi dengan Kepala Bidang untuk memberi laporan sementara dan meninta ketersediaan waktu

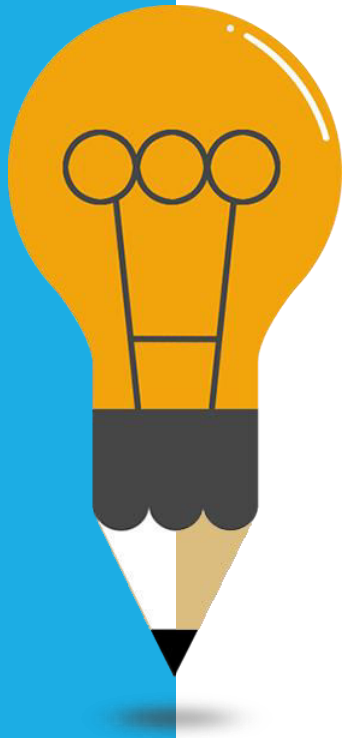

Realisasi Kegiatan

Kegiatan 1:

Melapor kepada atasan rencana pemetaan daerah rawan kasus

01

meminta kesediaan waktu mentor untuk berdiskusi

02

meminta saran dan masukan dari mentor

Nilai organisasi:
Profesional,
Kerjasama

Output

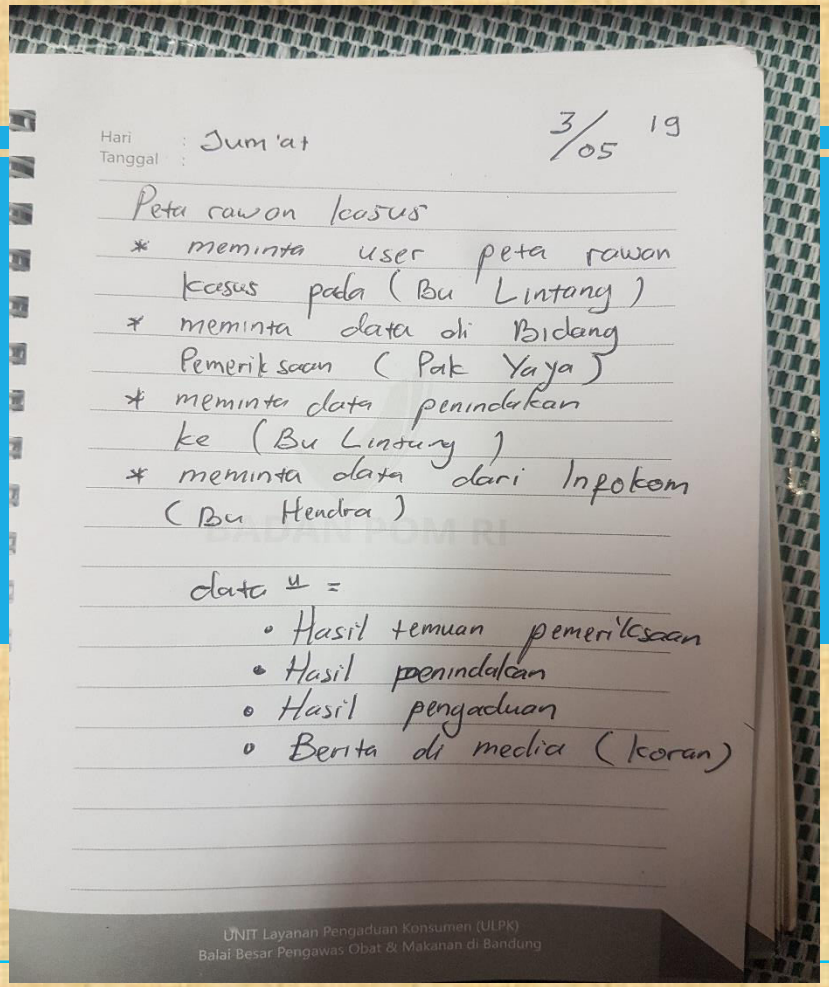

Hari : Jum'at
Tanggal : 3/05 19

Peta rawan kasus
* meminta user peta rawan kasus pada (Bu Lintang)
* meminta data di Bidang Pemeriksaan (Pak Yaya)
* meminta data penindakan ke (Bu Lintang)
* meminta data dari Infokom (Bu Hendra)

data u =
- Hasil temuan pemeriksaan
- Hasil penindakan
- Hasil pengaduan
- Berita di media (koran)

UNIT Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK)
Balai Besar Pengawas Obat & Makanan di Bandung

Masukan dari Atasan

Analisis Dampak

No	Kegiatan	Nilai Aneka	Analisis Dampak	
			Dengan Aneka	Tanpa Aneka
1	Melapor kepada atasan rencana pemetaan daerah rawan kasus	Akuntabilitas (patuh dan taat pada perintah atasan)	Pertemuan dengan atasan akan berjalan lancar sesuai waktu yang ditentukan atasan	Kesulitan untuk melakukan pertemuan dengan atasan terkait sibuknya jadwal atasan
		Nasionalisme (kerjasama, musyawarah)	Mendapatkan masukan dari atasan terkait pemetaan yang akan dilaksanaka	Tidak adanya masukan dari atasan yang akhirnya akan menyulitkan pemetaan daerah rawan kasus
		Etika Publik (sopan & santun)	Dengan sikap sopan dan santun, penulis mendapatkan Kemudahan dalam mendapatkan masukan dari atasan	Hasil musyawarah tidak maksimal

Kegiatan 2:

Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pemetaan daerah rawan kasus

01
Menghubungi bagian bidang Pemeriksaan, Penindakan, dan Infokom BBPOM Bandung sebagai penyimpan data

02
Berkoordinasi dengan staf di Balaoi Besar Pom di Baandung untuk mendapatkan data pemeriksaan

03
Mengolah data yang telah dikumpulkan

Nilai organisasi:
Profesional,
Kredibel

Output

Data Awal Pemetaan

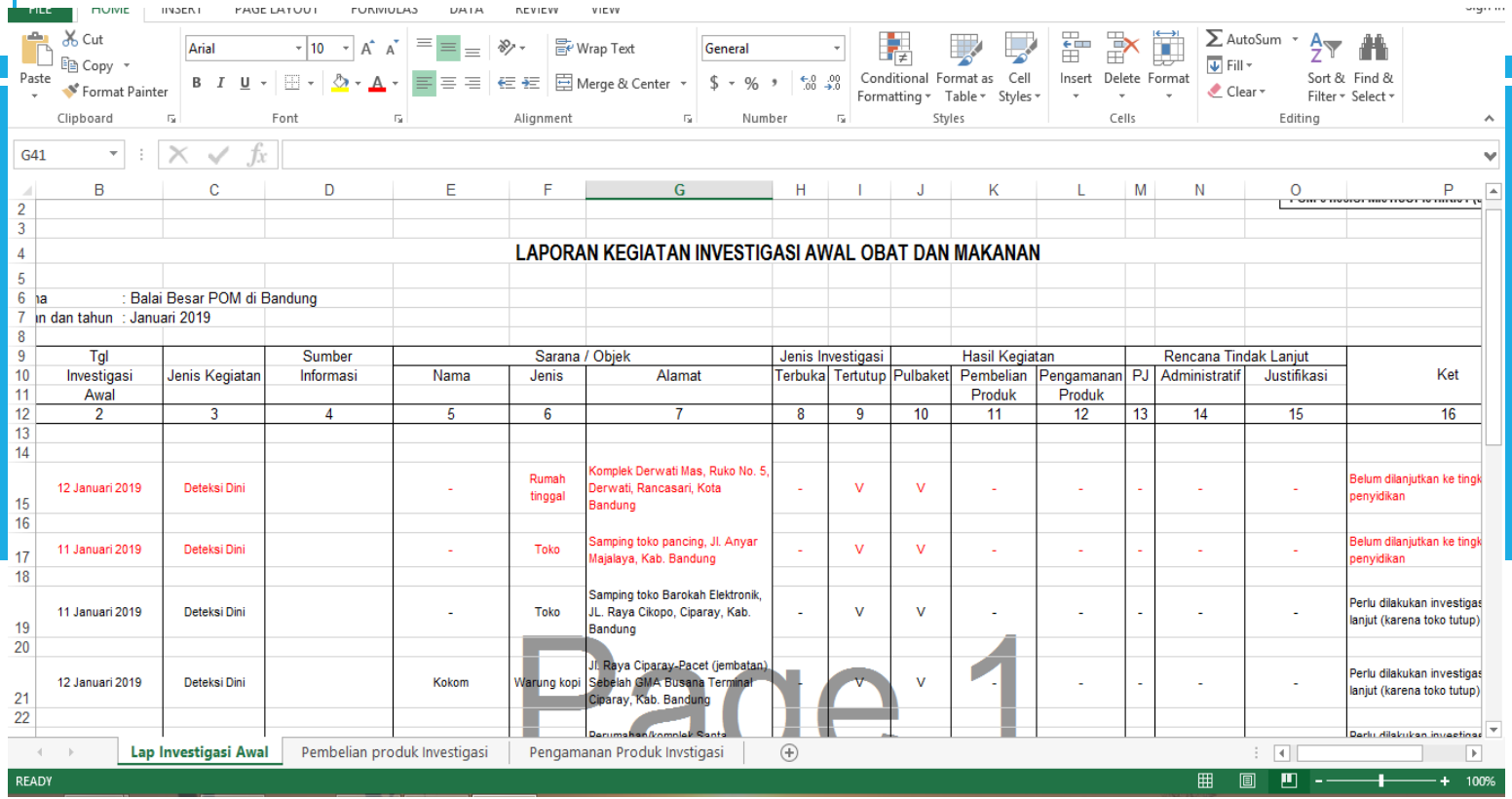

LAPORAN KEGIATAN INVESTIGASI AWAL OBAT DAN MAKANAN

ha : Balai Besar POM di Bandung
n dan tahun : Januari 2019

Tgl Investigasi Awal	Jenis Kegiatan	Sumber Informasi	Sarana / Objek			Jenis Investigasi		Hasil Kegiatan			Rencana Tindak Lanjut			Ket
			Nama	Jenis	Alamat	Terbuka	Tertutup	Pulbaket	Pembelian Produk	Pengamanan Produk	PJ	Administratif	Justifikasi	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
12 Januari 2019	Deteksi Dini		-	Rumah tinggal	Komplek Derwati Mas, Ruko No. 5, Derwati, Rancasari, Kota Bandung	-	V	V	-	-	-	-	-	Belum dilanjutkan ke tingk penyidikan
11 Januari 2019	Deteksi Dini		-	Toko	Samping toko pancing, Jl. Anyar Majalaya, Kab. Bandung	-	V	V	-	-	-	-	-	Belum dilanjutkan ke tingk penyidikan
11 Januari 2019	Deteksi Dini		-	Toko	Samping toko Barokah Elektronik, JL. Raya Cikopo, Ciparay, Kab. Bandung	-	V	V	-	-	-	-	-	Perlu dilakukan investigas lanjut (karena toko tutup)
12 Januari 2019	Deteksi Dini		Kokom	Warung kopi	Jl. Raya Ciparay-Pacet (jembatan) Sebelah GMA Busana Terminal Ciparay, Kab. Bandung	-	V	V	-	-	-	-	-	Perlu dilakukan investigas lanjut (karena toko tutup)

Lap Investigasi Awal | Pembelian produk Investigasi | Pengamanan Produk Invstigasi

Page 1

Data Dari Bidang Penindakan

Data dari Bidang Pemeriksaan

Kab. Cianjur.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

C3 | 2019-01-01

Komoditi	Kosmetik
Pemeriksaan Awal	2019-01-01
Pemeriksaan Akhir	2019-06-11
Balai Besar / Balai POM	

Kab. Cianjur

No.	Informasi Produk						
	Nama Produk	Nomor Registrasi	No Batch	Netto	Tanggal Expire	Klasifikasi Produk	Kategori
1	BVO Long Lasting Make Up	-	-	-	-	Impor	TIE
2	Glitter Shiny Eye Shadow	-	-	4,5g	-	Impor	TIE
3	Ilena Lipstik	-	-	-	-	Impor	TIE
4	MAC Lipstik	-	-	-	-	Impor	TIE
5	Matte Lipstik	-	-	-	-	Impor	TIE
6	Mysaho baked Powder	-	-	12g	-	Impor	TIE
7	Nyx 3D Lipstik	-	-	-	-	Lokal	TIE
8	Ralo POwder	-	-	-	-	Impor	TIE
9	Romantic Beauty Lip	-	-	-	-	Lokal	TIE
10	SOC lipstik	-	-	-	-	Lokal	TIE
11	SOC oh Sweety	-	-	-	-	Lokal	TIE

cianjur

Worksheet

READY

Data dari Media

Sekilas DAERAH

Satu Desa, Satu Rumah Tahfiz

INDRAMAYU - Bupati Indramayu Supendi ingin ada satu rumah tahfiz di setiap desa. Dengan adanya rumah tahfiz, diharapkan bisa menambah nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Pemerintah berharap program religius itu bisa segera terlaksana. "Program ini bertujuan untuk mencetak generasi gemilang di masa depan. Kami berharap, setiap warga membaca dan menguasai isi kandungan yang ada di dalam Alquran. Saat ini, masih sedikit rumah tahfiz di Indramayu. Jika di setiap desa ada rumah tahfiz, maka anak-anak bisa mempelajari nilai-nilai agama lebih dalam. Ini penting untuk menunjang dan mengembangkan nilai keagamaan di tengah masyarakat. Saya ingin semua anak-anak Muslim Indramayu semua bisa baca Alquran dan memahami isinya bahkan menghafalnya. Jika ini bisa dilakukan akan lahir tahfiz-tahfiz dari generasi anak-anak Indramayu," katanya, Rabu (15/5/2019). Sejauh ini, kata dia, pemkab terus mendukung peningkatan nilai religius masyarakat salah satunya dengan komitmen nol miras. Aturan itu pun sudah tertuang di dalam perda. Jadi, peredaran miras di Kabupaten Indramayu diawasi ketat oleh petugas. **(GG)***

Takjil Gratis untuk Tukang Becak

MAJALENGKA - Kapolres Majalengka dan Ketua Bhayangkari serta sejumlah stafnya, membagi paket takjil dan santunan kepada sejumlah tukang becak dan pemulung sampah di tempat pembuangan sementara di Jalan Sukarame, Kelurahan Majalengka Kulon, Kecamatan Majalengka, Rabu (15/5/2019). Kapolres Majalengka Ajun Komisaris Besar Mariyono, kegiatan yang dilakukannya selama Ramadan itu untuk mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat serta berbagi kebahagiaan. Pada kesempatan itu, Kapolres mengajak warga untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekitar, agar tercipta suasana yang kondusif. "Hal ini juga adalah momentum bagi kita untuk meraih keberkahan di bulan yang baik ini," kata Kapolres didampingi istri, Fujci Mariyono kepada wartawan *Kabar Cirebon*, **Tati Pumawati**. Sejumlah tukang becak dan pemulung tampak gembira mendapat paket tersebut. Sebagian di antaranya ada yang sengaja datang ke lokasi itu saat mengetahui ada kapolres dan istri.***

Polisi Temukan Kosmetik Ilegal di Pasar

KARAWANG - Sejumlah kosmetik ilegal, terutama krim pemutih wajah, kedapatan dijual bebas di Pasar Cikampek. Kosmetik yang diduga mengandung bahan berbahaya tersebut disita Satuan Reserse Narkoba Polres Karawang, Rabu (15/5/2019). "Saat ini kami tengah menelusuri pabrik yang memproduksi kosmetik ini," ujar Kasatres Narkoba Polres Karawang Ajun Komisaris Agus Susanto. Menurut dia, puluhan kosmetik ilegal itu disita dari sejumlah kios kecil di Pasar Cikampek. Penyitaan berawal dari laporan warga terkait adanya peredaran kosmetik ilegal di pasar itu. "Berawal dari laporan itu, pada pukul 9.00, kami melakukan penyisiran ke sejumlah warung di Pasar Cikampek untuk mencari keberadaan kosmetik ilegal. Hasilnya, kami menemukan sejumlah krim pemutih wajah yang tidak sesuai perizinan kesehatan. Kosmetik yang dijajakan memang tidak banyak, hanya sekitar 5-10 kemasan per kios. Namun, tetap kami amankan karena dikhawatirkan membahayakan penggunanya. Kami akan menelusuri asal muasal barang-barang ini dengan meminta keterangan dari penjual. Sampel kosmetik yang kami sita kami kirim ke laboratorium untuk diteliti. Kami uji bersama Kefarmasian Dinkes Kabupaten Karawang," katanya. **(DR)***

Tangerang
Jakarta
Bekasi
Cikampek
Purwakarta
Bogor
Indramayu
Cirebon
Sukabumi
Bandung
Kuningan
Brebes
Tegal
Pekalongan
JAWA BARAT
Tasikmalaya
Purwokerto
Banjarnegara
Cilacap
Kebumen

Analisis Dampak

No	Kegiatan	Nilai Aneka	Analisis Dampak	
			Dengan Aneka	Tanpa Aneka
2	Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk pemetaan daerah rawan kasus	Akuntabilitas (tanggung jawab)	Data untuk pemetaan diperoleh dengan baik dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan	Pemetaan daerah rawan kasus akan sulit dilakukan jika data awal tidak didapatkan dengan baik
		Nasionalisme (transparansi)	Data yang diperoleh diketahui oleh atasan dan staff internal	Dalam memperoleh data, tidak diketahui oleh atasan atau staff lain sehingga kerjasama tim tidak berjalan baik
		Komitmen Mutu (data valid dan bisa diaplikasikan))	Data awal pemetaan telah sesuai dengan yang seharusnya	Data yang tidak valid akan membuat pemetaan tidak tepat atau sesuai yang seharusnya

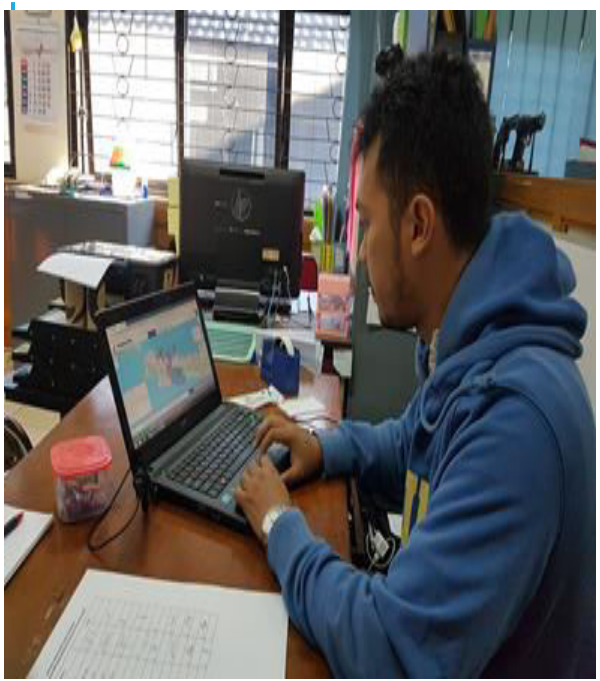

Kegiatan 3:

Pembuatan peta daerah rawan kasus

01

Menyiapkan alat dan bahan

02

Mengaplikasikan d ata yang telah didapatkan dalam bentuk peta

03

Mengecek kembali data yang sudah diaplikasikan kedalam peta

Nilai organisasi: Profesional, Kerjasama

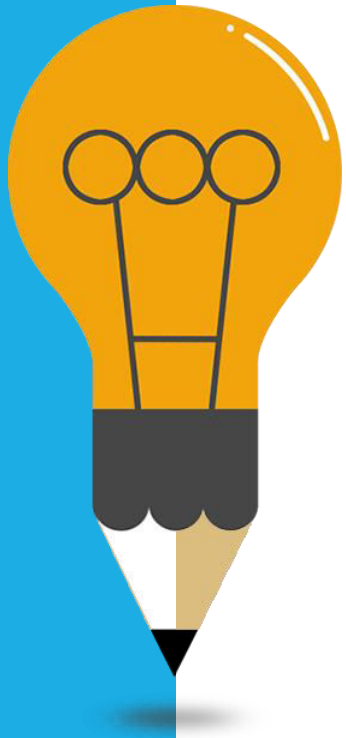

Output

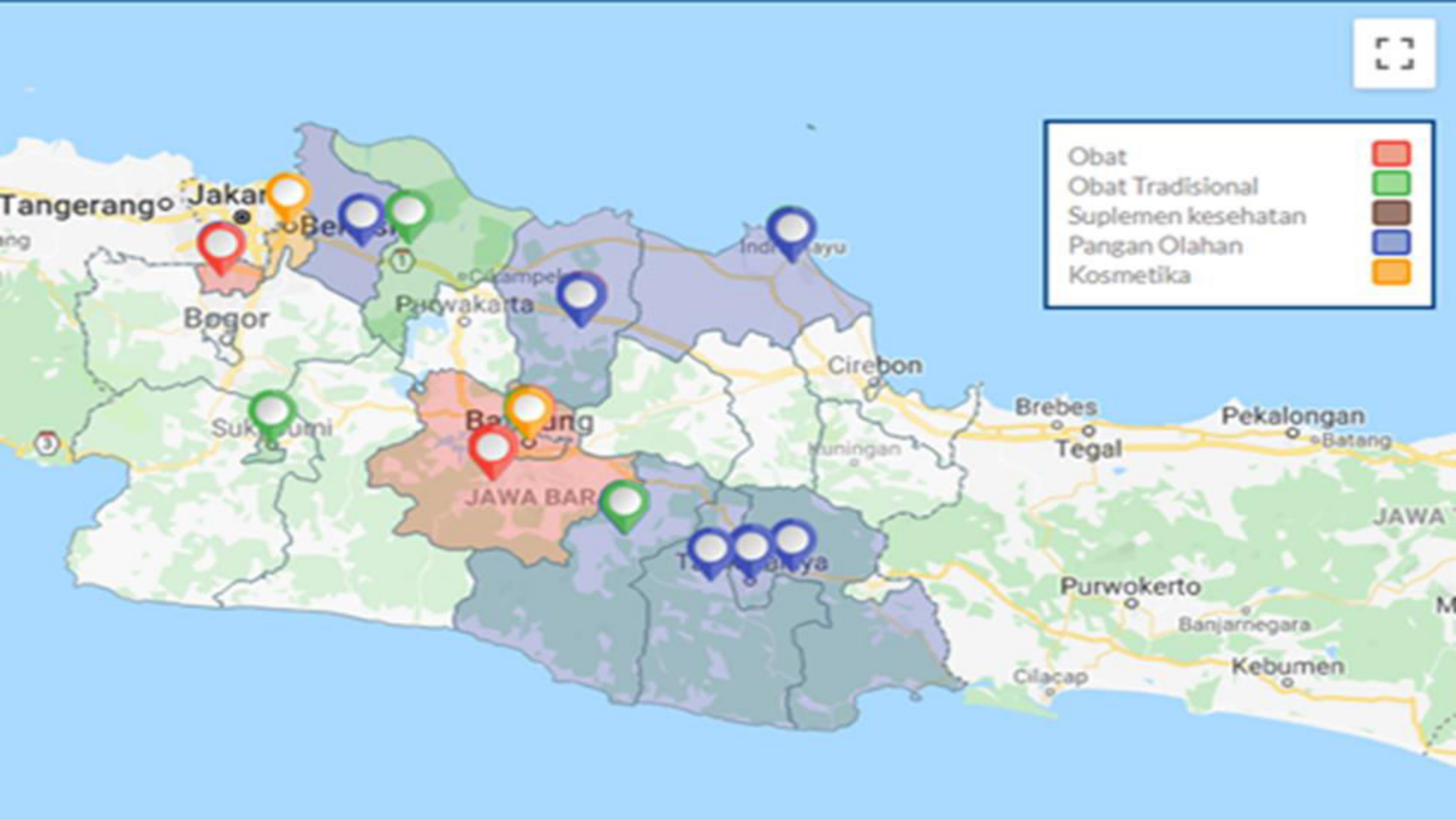
Obat
Obat Tradisional
Suplemen kesehatan
Pangan Olahan
Kosmetika
Tangerang
Jakar
Bogor
Purwakarta
Cirebon
Brebes
Tegal
Pekalongan
Batang
JAWA BAR
Purwokerto
Banjarnegara
Kebumen
Cilacap

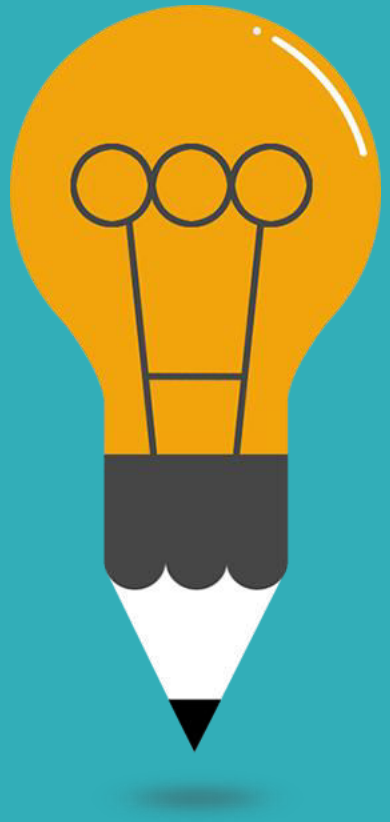

- Obat
- Obat Tradisional
- Suplemen kesehatan
- Pangan Olahan
- Kosmetika

Rawan Kasus Pangan Olahan

Rawan Kasus Obat

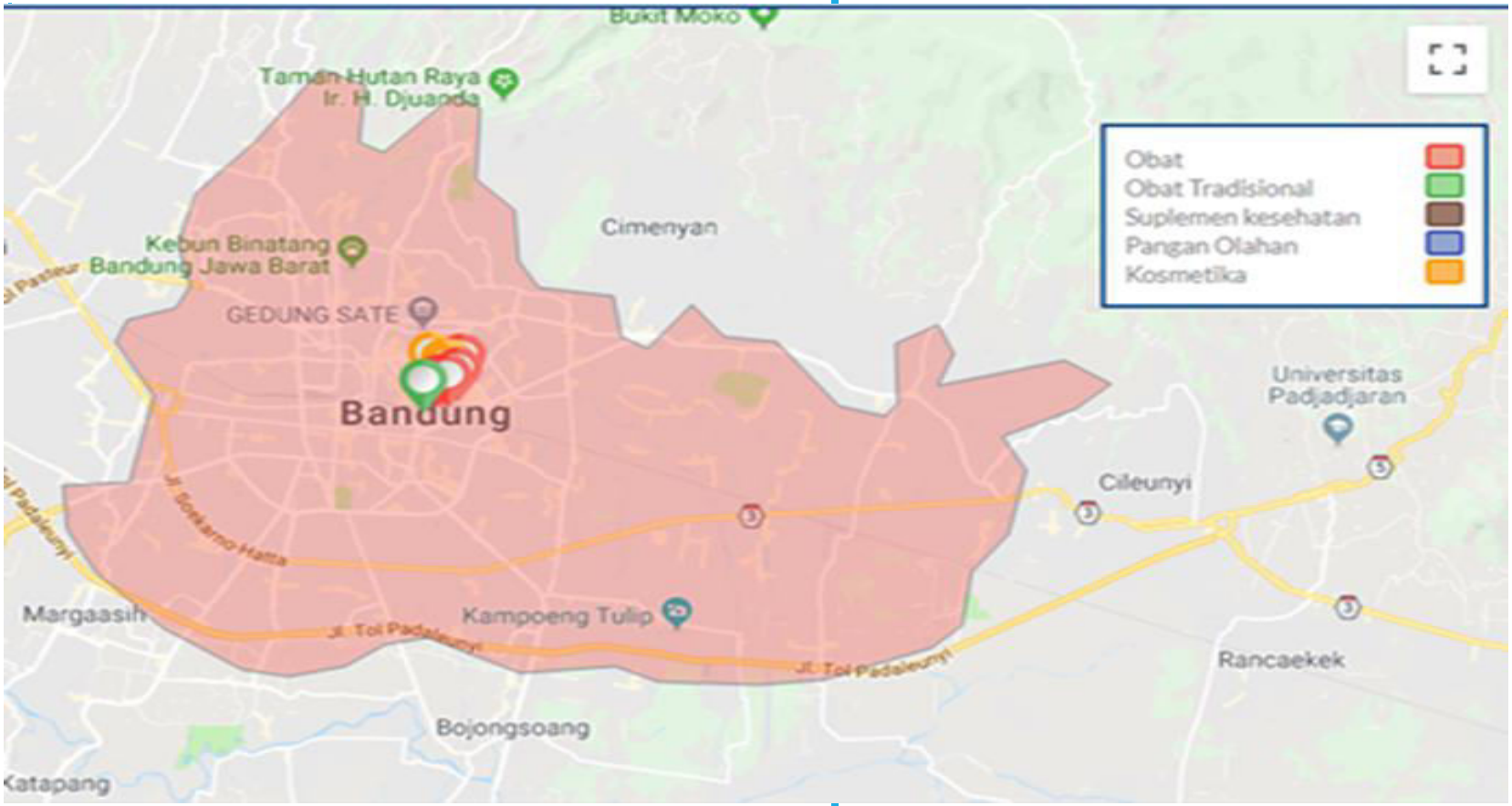

Analisis Dampak

No	Kegiatan	Nilai Aneka	Analisis Dampak	
			Dengan Aneka	Tanpa Aneka
3	Pemetaan daerah rawan kasus	Akuntabilitas (tanggung jawab)	Pemetaan dilakukan dengan tuntas hingga berjalan lancar	Pemetaan tidak dilakukan dengan tuntas karena sikap integritas atau kesamaan kata dan perbuatan tidak diterapkan
		Nasionalisme (rela berkorban)	Pemetaan dilakukan sesuai dengan yang direncanakan	Pemetaan akan sulit selesai pada waktu yang ditentukan jika tidak menerapkan sikap rela berkorban (waktu dan tenaga)
		Etika Publik (taat aturan)	Pemetaan dilakukan sesuai dengan aturan atau saran dari atasan	Pemetaan akan jauh dari rencana yang diharapkan karena tidak sesuai dengan aturan ataupun

Kegiatan 4:

Meminta atasan mengkoreksi peta yang sudah dibuat

01
Menyerahkan peta yang sudah dibuat kep ada atasan

02
Mencatat saran, masukan dan k oreksi dari atasan

03
Memperbaiki peta sesuai saran, masukan dan koreksi atasan

Nilai organisasi:
Profesional,
Kerjasama

Analisis Dampak

No	Kegiatan	Nilai Aneka	Analisis Dampak	
			Dengan Aneka	Tanpa Aneka
4	Meminta atasan untuk mengkoreksi pemetaan yang sudah dibuat	Akuntabilitas (patuh)	Pemetaan yang telah dibuat sebelumnya dikoreksi oleh atasan sehingga sesuai dengan yang diharapkan	Pemetaan yang dibuat sebelumnya akan menjad tidak sesuai apabila tidak mematuhi saran koreksi dari atasan
		Nasionalisme (kerjasama)	Pemetaan dikoreksi melalui kerjasama yang baik dengan atasan	Proses koreksi peta tidak berjalan dengan lancar tanpa adanya kerjasama yang baik dengan atasan
		Etika Publik (sopan santun)	Proses koreksi pemetaan oleh atasan berjalan kondusif	Tanpa adanya sikap sopan santun, proses koreksi pemetaan akan berjalan kurang lancar

Kegiatan 5:

Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus

1.Menentukan waktu untuk melakukan sosialisasi
2.Mempersiapkan tempat untuk sosialisasi
3.Melakukan sosialisasi
4.Meminta saran dan masukan dari stakehold er internal
5. Menindaklanjuti saran dan masukan dari stakeholder internal

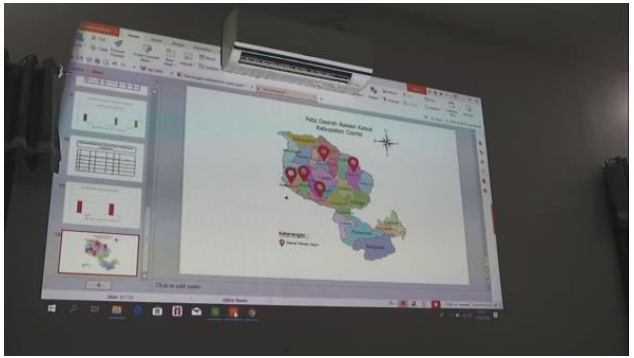

Nilai organisasi:
Profesional,
Kerjasama

Output

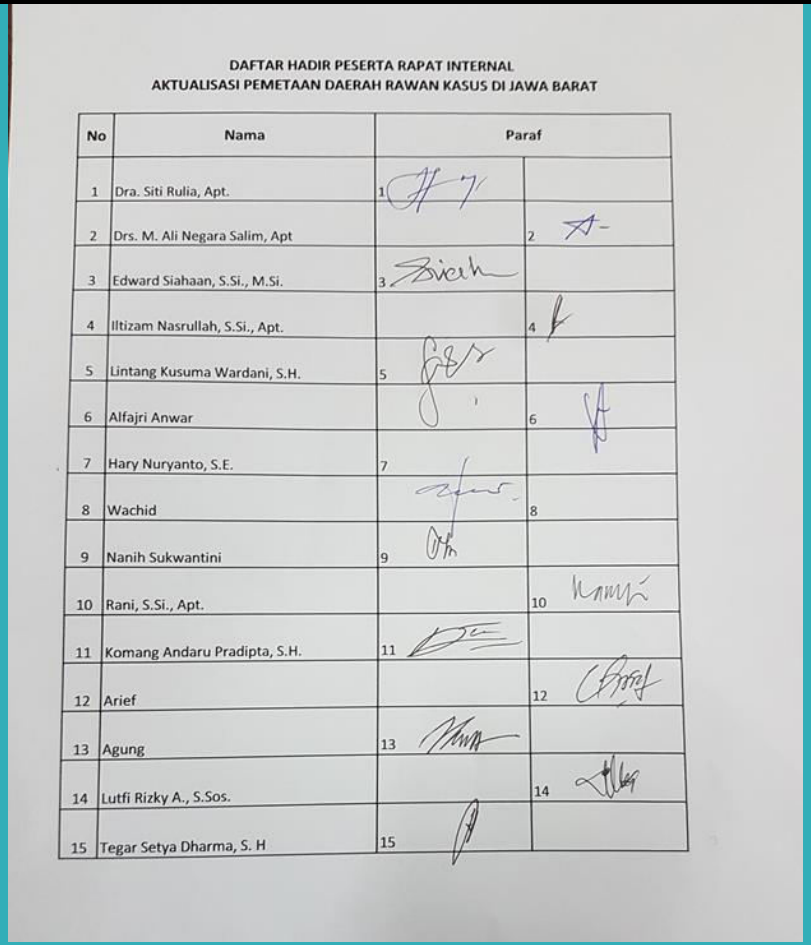

DAFTAR HADIR PESERTA RAPAT INTERNAL
AKTUALISASI PEMETAAN DAERAH RAWAN KASUS DI JAWA BARAT

No	Nama	Paraf	
1	Dra. Siti Rulia, Apt.	1	
2	Drs. M. Ali Negara Salim, Apt		2
3	Edward Siahaan, S.Si., M.Si.	3	
4	Iltizam Nasrullah, S.Si., Apt.		4
5	Lintang Kusuma Wardani, S.H.	5	
6	Alfajri Anwar		6
7	Hary Nuryanto, S.E.	7	
8	Wachid		8
9	Nanih Sukwantini	9	
10	Rani, S.Si., Apt.		10
11	Komang Andaru Pradipta, S.H.	11	
12	Arief		12
13	Agung	13	
14	Lutfi Rizky A., S.Sos.		14
15	Tegar Setya Dharma, S. H	15	

Daftar Hadir Sosialisasi

Analisis Dampak

No	Kegiatan	Nilai Aneka	Analisis Dampak	
			Dengan Aneka	Tanpa Aneka
5.	Sosialisasi internal pemetaan daerah rawan kasus	Akuntabilitas (kejelasan)	Sosialisasi dilaksanakan dengan waktu dan tempat yang jelas sehingga dihadiri oleh atasan dan staff terkait	Pelaksanaan sosialsiasi akan tidak maksimal dengan tidak adanya kejelasan terkait tempat dan waktu
		Nasionalisme (Kerjasama, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar)	Kegiatan sosialisasi berjalan lancar	Kegiatan sosialisasi akan berjalan kurang lancar tanpa adanya kerjasama dan penggunaan bahasa yang baik
		Etika Publik (sopan santun)	Kegiatan Sosialisasi berjalan kondusif	Tanpa adanya sopan dan santun, penyampaian sosialisasi akan berjalan tidak kondusif

Thank you

Insert the title of your subtitle Here